



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Dana Alokasi Khusus-Anggaran Berbasis Proposal Daerah
Tanggal	: Kamis, 18 Februari 2016
Surat Kabar	: Bisnis Indonesia
Halaman	: 4

► DANA ALOKASI KHUSUS

Anggaran Berbasis Proposal Daerah

JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memproyeksikan penggelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 berbasis proposal yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Arifin Rudianto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, mengatakan penilaian DAK berbasis proposal untuk menunjang pembangunan prioritas nasional. Proposal itu juga menjadi instrumen yang objektif bagi Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menilai proyeksi DAK.

"Jadi jangan sampai nanti alokasi DAK memenuhi keinginan kepada daerah yang mungkin tidak menunjang langsung dengan prioritas nasional," katanya, di Jakarta, Rabu (17/2).

Selama ini DAK yang diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota secara 'gelondongan', baru kemudian bantuan membuat program pembangunan. Dia menilai basis proposal ini akan memperlhatkan perencanaan penentuan DAK sesuai dengan prioritas nasional sehingga program pusat dan daerah dapat terkoneksi.

Namun, dia memastikan semua daerah tetap memperoleh DAK yang besarnya tergantung pada program yang disertakan pada proposal. Tahun ini, DAK berbasis proposal sudah mulai dilakukan secara bertahap, tetapi mulai diterapkan secara menyeluruh pada 2017.

"Misal pusat sudah bangun bendungan dan irigasi harus dibangun daerah, salah satu pembbiayaannya kan melalui daerah. Melalui proposal bisa mengajukan irigasi untuk air dari bendungan ini ke lahan sawah, ini supaya produktivitas meningkat. Itu salah satu nilai lebih dari proposal," ujarnya.

Arifin menambahkan pemanfaatan DAK lebih mengarah pada peningkatan efektivitas belanja, termasuk pembangunan kewilayahan di luar Jawa. Konektivitas daerah perbatasan dan tertinggal disiapkan DAK afirmasi khusus. Tahun ini, DAK afirmasi sebesar Rp2,82 triliun dan jumlahnya akan berlipat pada tahun depan.

Pemerintah juga telah menetapkan 10 pusat strategis nasional di wilayah perbatasan dan 150 lokasi prioritas. Lokasi prioritas merupakan kecamatan di wilayah perbatasan langsung dengan negara tetangga.

Keseluruhan kecamatan itu menjadi tanggung jawab pemerintah dengan bantuan dana yang dialokasikan langsung dari APBN.

"Kegiatan kawasan pendesaan itu melalui DAK. Ke depan tidak mungkin pemerintah pusat mengurus 83.000 desa, kemampuan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola dana desa," ujarnya.

Bappenas mengincar rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,17% pada 2017, meningkat dari target tahun ini sebesar 7,02%. Kemudian, persentase penduduk miskin di daerah tertinggal diharapkan turun menjadi 14,9% dari tahun sebelumnya yang diproyeksikan pada level 15,8%.

(Veronika Yasinta)

DPR - RI